

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Harahap, Y. (2021). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Kurnia, I., Sutomo, A., & Geraldio, C. (2022). Perwalian dan Permasalahannya. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 5(3), 463-469.

Muhammad, A. (2014). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

PEKKA. (2024). Perwalian anak dan pendampingan kasus yang berdimensi perdata (Panduan & SOP). PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga).

Sari, Y. N. (2020). Perwalian Anak di Bawah Umur yang Diberikan Kepada Ayah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Skripsi Sarjana, Universitas Indonesia).

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Syahputra, A. (2014). Perwalian anak dalam bingkai hukum. UIN Sumatera Utara Repository.

B. JURNAL

- Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1(1), hal. 55-64.
- Andriani, R., Bastomi, A., & Paramita, P. P. Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Dibawah Umur Dalam Perkara Nomor 5657/Pdt. G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal. 2652
- Azhari, A. (2021). “Penetapan Perwalian Anak oleh Pengadilan Negeri dan Dampaknya terhadap Hak Waris.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), hal. 122-135.
- Daim, N. A., & Abadi, S. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Perwalian Anak Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan Negeri Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Anak. *Law and Humanity*, 1(2), hal. 194-214.
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), hal. 331-342.
- Hartati, R., Syafrida, S., & Suryani, R. (2021). Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah). *Pamulang Law Review*, 4(2), hal. 205-220.

- Merchiano, R., Syafariansyah, M., Effendi, E., Ichandri, I., & Sadli, S. (2023). Analisis Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama tentang Perwalian Anak Kandung yang Masih di Bawah Umur. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), hal. 49-62.
- Nazmi, D., & Syofyan, S. (2023). Pengaturan Perlindungan Hak Anak di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), hal. 774-784.
- Rosnawati, E. (2017). Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Justitia: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 1(2), hal. 279–294.
- Rozalia, R., & Djajaputra, G. (2024). Akibat Hukum Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tuanya telah Meninggal Dunia. *UNES Law Review*, 6(4), hal. 9957-9967.
- Utami, N. F., & Indrawati, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), hal. 62-70.
- Wulandari, A. (2021). Prosedur Permohonan Perwalian Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara Nomor 280/Pdt. P/2021/PA. Smg) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara RI Nomor 1, Tambahan Lembaran RI Nomor 3096)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara RI Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara RI Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5077)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. (Lembaran Negara RI Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6339)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. (Berita Negara RI Nomor 894)

D. LAIN-LAIN

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Delapan nilai Mahkamah Agung. <https://www.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 6 Mei 2025, 13.30 WIB

E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Registrasi perkara. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 7 Mei 2025, 14.20 WIB.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (2025). Tentang pengadilan. <https://www.pn-jakartabarat.go.id>, diakses pada tanggal 8 Mei 2025, 12.35 WIB.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). (2025). Informasi perkara dan jadwal sidang. <https://sipp.pn-jakartabarat.go.id>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025, 12.50 WIB.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (2025). Putusan nomor 230/Pdt.P/2025/PN Jkt.Brt. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus, diakses pada tanggal 9 Mei 2025, 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus "Proses Persidangan Perkara Permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat". Hasil wawancara pribadi pada hari Rabu, 14 Mei 2025, 17.05 WIB